

**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KAB. BOMBANA
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana Tahun 2022 dapat diselesaikan tepat waktu sebagai wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tupoksi organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 ini menyajikan beberapa hal antara lain :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang diamanatkan oleh Bupati Bombana telah diselenggarakan sebagaimana mestinya.
2. Masih terdapat beberapa kegiatan yang pelaksanaannya belum semaksimal mungkin mengingat keterbatasan dana, sarana dan prasarana serta personil yang ada dalam pelaksanaan tugas-tugas operasional di lapangan.
3. Dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan, seluruhnya telah dilaksanakan dengan tingkat keberhasilan diwujudkan secara optimal.
4. Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang kami sajikan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi kesempurnaan penyusunan LAKIP di tahun yang akan datang.

Terima Kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi pemikiran dalam penyusunan LAKIP Tahun 2022 ini, semoga LAKIP Satpol PP ini dapat menjadi acuan yang dapat memberikan arah pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP selanjutnya, sebagai organisasi penegak Regulasi Daerah dan Penyelenggaraan Kententraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Kabupaten Bombana

Rumbia, 20 Januari 2023

Kepala Satuan,



RUSMAN, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
BNTP. 19670504 199003 1 015

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa di Indonesia, ada beberapa hal yang wajib untuk diperhatikan secara mendalam demi mewujudkan cita-cita luhur tersebut, dimana pemerintahan yang bersih dan berwibawa merupakan suatu angan-angan yang bisa terwujud menjadi suatu kenyataan ataupun sebaliknya akan menjadi impian yang tak akan pernah terwujud, maka untuk mencapai harapan tersebut dan sejalan dengan dikeluarkannya Tap MPR Nomor XI / MPR / 1998 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagai tindak lanjut diterbitkanlah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun LAKIP setiap tahunnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Satpol PP Kabupaten Bombana telah merencanakan dan menerapkan Strategi Pencapaian Sasaran Program Kegiatan berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Bombana serta kebijakan sebagai upaya meningkatkan pelaksanaan Pemerintahan yang lebih berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab, serta lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka perwujudan *good governance*.

Dalam upaya merealisasikan pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan, Satpol PP Kabupaten Bombana mempunyai tugas pokok dan fungsi :

a. Tugas :

1. Menegakan Pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan dan Keputusan Bupati.

2. Menyelenggarakan Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum.
3. Perlindungan Masyarakat
4. Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

b. Fungsi :

Satpol PP Kabupaten Bombana dalam melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana program dan pelaksanaan penegakan perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat, serta pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan perda dan peraturan bupati
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
5. Pelaksanaan koordinasi penegakan perda dan peraturan bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan POLRI, PPNS dan instansi teknis lainnya.
6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati perda dan peraturan bupati.
7. Perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemadam kebakaran, penyelamatan dan sarana teknis.
8. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pencegahan, pemadam kebakaran, penyelamatan dan sarana teknis.
9. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. GAMBARAN UMUM LAKIP	1
1.2. DATA UMUM ORGANISASI	2
1.3. ISU-ISU STRATEGIS	3
1.4. MAKSUD DAN TUJUAN	5
1.5. SISTEMATIKA LAKIP 2021	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
2.1. RENCANA STRATEGIS	8
2.2. RENCANA KINERJA	10
2.3. PERJANJIAN KINERJA	11
2.4. PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
3.1. PENGUKURAN KINERJA	23
3.2. REALISASI ANGGARAN	37
BAB IV PENUTUP	39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. GAMBARAN UMUM LAKIP

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pada hakekatnya memberikan otonomi kepada pemerintah daerah untuk mengurus, mengatur dan mengelola berbagai kegiatan pemerintahan dan pembangunan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat di daerah. Terselenggaranya cara berpemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan Negara. Olehnya itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Ketetapan MPR RI Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta ditindaklanjuti dengan adanya Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 perihal yang sama. Pemerintah juga telah mendorong terwujudnya *Good Governance* di kalangan instansi pemerintah dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai tindak lanjut atas aturan tersebut di atas. Selanjutnya diperjelas lagi dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. DATA UMUM ORGANISASI

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 03 Tahun 2016, dengan tugas pokok membantu Bupati Bombana dalam penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan dan Keputusan Bupati, perlindungan masyarakat serta pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana program dan kegiatan pelaksanaan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, penegakan pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan dan Keputusan Bupati, perlindungan masyarakat, serta pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
2. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum;
3. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan dan Keputusan Bupati;
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
5. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan dan Keputusan Bupati dengan aparat Kepolisian Republik Indonesia, PPNS dan Instansi terkait;
6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah, Peraturan dan Keputusan Bupati;
7. Perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemadam kebakaran, penyelamatan dan sarana teknis;

8. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pencegahan, pemadam kebakaran, penyelamatan dan sarana teknis; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Satpol PP.

1.3. ISU-ISU STRATEGIS

Untuk mewujudkan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bombana yang optimal sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dengan memperhatikan potensi peluang dan tantangan yang mungkin timbul, dapat dilakukan analisa SWOT sebagai berikut :

1. Faktor Lingkungan Internal

a. Kekuatan (*Strength*)

- Dukungan Sumber Daya Manusia sebanyak 175 orang yang terdiri dari 147 orang PHTT dan 28 orang PNS.
- Dukungan sarana dan prasarana operasional kantor dan operasional lapangan.
- Adanya perangkat peraturan perundang-undangan yang mendukung Satuan Polisi Pamong Praja :
- Adanya kemitraaan antara Pemerintah Daerah, TNI. POLRI, Kejaksaan, LSM, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Komponen Masyarakat.

b. Kelemahan (*Weaknesses*) :

- Kurangnya analisa lapangan dalam menentukan kebijakan operasional karena Kemampuan dan keterampilan personil yang terbatas.
- Kurang akuratnya data dan informasi tentang keamanan dan ketertiban umum karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung.
- Dukungan anggaran yang terbatas.

2. Faktor Lingkungan Eksternal

a. Peluang (*Opportunities*)

- Adanya pembinaan personil melalui pendidikan dan latihan.
- Adanya dukungan kebijakan dan regulasi pemerintah daerah.
- Semakin meningkatnya proses pemberdayaan seluruh perangkat aparaturnya dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia yang mengarah pada ketertiban dan keamanan yang baik secara struktural maupun sosial.

b. Tantangan (*Threats*)

- Pemahaman masyarakat yang makin maju terhadap hukum.
- Kurangnya kemampuan dan pemahaman aparat terhadap peraturan perundang-undangan.
- Mahalnya biaya koordinasi keamanan dan ketertiban sebagai akibat tuntutan beragamnya karakteristik wilayah daratan dan kepulauan serta karakteristik penduduk (suku, bahasa, agama dan budaya yang berbeda dalam menerima kualitas perubahan pembangunan).

Dalam penyelenggaraan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana yang optimal sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dengan memperhatikan potensi peluang dan tantangan yang mungkin timbul yang dirumuskan sebagai isu-isu strategis sebagai berikut :

- ❖ Peningkatan kesejahteraan aparat/anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana mengingat resiko kerja yang tinggi.
- ❖ Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana.
- ❖ Peningkatan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat serta mengoptimalkan penegakan perundang-undangan daerah.
- ❖ Peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui pendekatan humanif dan persuasif.

- ❖ Peningkatan peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana dalam pencegahan dini serta penanggulangan bencana kebakaran.
- ❖ Peningkatan kualitas sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana.
- ❖ Peningkatan kualitas layanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana.
- ❖ Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum, keamanan dan kenyamanan lingkungan.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun sebagai sarana bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerja kepada stakeholders (Bupati, DPRD dan Masyarakat Bombana) dan sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana sebagai upaya perbaikan kinerja ke depan.

Proses penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana dilakukan dengan cara pengumpulan data kinerja kegiatan masing-masing seksi yang berisikan indikator kinerja, satuan indikator serta rencana dan realisasi kegiatan yang tertuang dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) unit kerja instansi pemerintah.

1.5. SISTEMATIKA LAKIP 2022

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Bombana selama Tahun 2022, Capaian Kinerja (*Performance Results*) 2022 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*). Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022 dapat diilustrasikan dalam bagan berikut ini :

Uraian singkat masing-masing bab adalah sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas profil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana dalam menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP 2022.
- Bab II Perencanaan Kinerja, menjelaskan muatan strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana untuk periode 2017 s/d 2022 dan rencana serta perjanjian kinerja Tahun 2022.
- Bab III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana dikaitkan dengan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja.
- Bab IV Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari LAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana Tahun 2022 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana salah satu lembaga yang mempunyai rencana strategis berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk Tahun 2017 s/d 2022 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis mencakup tujuan dan sasaran, sementara cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini. Kemudian, sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2022 akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja (*Performance Plan*) Tahun 2022.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integritas antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholders dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional maupun global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan tantangan/kendala (*threats*) yang ada.

Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah dengan perkataan lain, rencana strategis yang disusun oleh suatu instansi pemerintah setidaknya mengandung tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya dan menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya. Dengan tujuan dan strategi yang jelas dan tepat, maka diharapkan instansi pemerintah

akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Perencanaan strategis bersama pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Perencanaan strategis setidaknya digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan : (1) Dimana kita sekarang? (2) Ke mana kita akan menuju? (3) Bagaimana kita menuju ke sana? Dengan melakukan analisis internal dan eksternal.

Penjabaran tujuan dan sasaran strategis organisasi, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi di dalam memenuhi visi misi kepala daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pertanyaan bagaimana kita menuju ke sana, dijawab dengan merumuskan strategi pencapaian tujuan/saran dalam wujud menetapkan kebijakan, program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh organisasi.

Dari uraian singkat di atas, unsur-unsur utama yang perlu secara formal didefinisikan dalam suatu perencanaan strategis adalah penjabaran tujuan/sasaran berupa kebijakan program dan kegiatan.

2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana disusun sebagai alat kendali dan tolak ukur bagi manajemen dalam penyelenggaraan pembangunan 5 (lima) tahun dan tahunan serta untuk penilaian keberhasilan.

Di samping itu, Rencana Strategis (renstra) yang disusun juga ditujukan untuk memacu penyelenggaraan pembangunan agar lebih terarah dan terjamin tercapainya sasaran strategis pembangunan 5 (lima) tahun mendatang bagi

manajemen Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana, rencana strategis dipandang sebagai :

- ❖ Alat bantu bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- ❖ Gambaran visi, misi, persepsi dan interpretasi serta strategi bagi Pemerintah Kabupaten Bombana untuk mengantisipasi tantangan pembangunan yang dihadapi.
- ❖ Alat untuk memacu dan memicu aparat serta masyarakat dalam proses mencapai sasaran yang ditetapkan.

Renstra sebagai alat bagi manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah selaras dengan upaya pencapaian tujuan/sasaran strategis. Dalam dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana 2017 s/d 2022 secara formal didefinisikan pernyataan tujuan/sasaran strategis serta strategi pencapaiannya (program dan kegiatan).

a. Tujuan, Sasaran dan Program

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana menetapkan tujuan strategis berdasarkan visi, misi bupati dan faktor-faktor kunci keberhasilan. Sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana yang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi dirumuskan untuk tujuan yang telah ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut :

Tujuan	Mewujudkan Pelayanan Publik Berkualitas
Sasaran	Meningkatnya kualitas pelayanan publik OPD
Program	1. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum 2. Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan

	Penyelamatan Non Kebakaran
Tujuan	Mewujudkan Pelayanan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel
Sasaran	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
Program	1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran Strategis Tahun 2017-2022, indikator kinerja dan target kinerja dapat dilihat pada matriks berikut :

1. TUJUAN I :

Mewujudkan Pelayanan Publik Berkualitas

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja					Kondisi Akhir 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik OPD	Tingkat Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan OPD)	NA	NA	Baik	Baik	Baik	Baik

2. TUJUAN II :

Mewujudkan Pelayanan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja					Kondisi Akhir 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	Hasil Evaluasi SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja oleh Inspektorat Daerah	NA	CC	BB	BB	A	A

2.2. RENCANA KINERJA

Rencana kinerja merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam 1 (satu) tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Rencana kinerja Tahun 2022 merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian, seluruh proses pelayanan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bombana dapat berjalan dengan baik.

Sasaran Strategis yang ingin dicapai berdasarkan dokumen perjanjian kinerja Tahun 2022, indikator kinerja dan target kinerja dapat dilihat pada matriks berikut :

No.	SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik OPD	Tingkat Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan OPD	Baik	Nilai
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	Hasil Evaluasi SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja oleh Inspektorat Daerah	A	Nilai

2.3. PERJANJIAN KINERJA

Kedua Sasaran Strategis dalam matriks tersebut di atas merupakan isi Perjanjian Kinerja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana Tahun 2022. Selanjutnya diterjemahkan lebih detail dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Sekretaris, Kepala Bidang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Kepala Bidang Pemadam Kebakaran sebagai berikut :

1. Matriks Perjanjian Kinerja Kepala Satuan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik OPD	Tingkat Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan	BAIK	Nilai

		OPD		
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	Hasil Evaluasi SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja oleh Inspektorat Daerah	A	Nilai

2. Matriks Perjanjian Kinerja Sekretaris

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1.	Terpenuhinya kebutuhan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun	3	Dokumen
2.	Terpenuhinya kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100	%
3.	Terpenuhinya kebutuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah	100	%
4.	Terpenuhinya kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	%
5.	Terpenuhinya kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100	%
6.	Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis dan jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang dibeli	6	jenis dan unit
7.	Terpenuhinya kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%

8.	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi	48	Unit
----	--	--	----	------

2.a. Matriks Perjanjian Kinerja Kasubag Program

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang ditetapkan	2	Dokumen
2.	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang ditetapkan	2	Dokumen
3.	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1	Dokumen

2.b. Matriks Perjanjian Kinerja Kasubag Umum

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1.	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	165	Stel
2.	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi kinerja pegawai	1	Dokumen
3.	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	2	Orang

4.	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jenis dan jumlah logistik kantor yang dibeli	12	Paket
5.	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis dan jumlah barang yang dicetak dan digandakan	12	Paket
6.	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan	60	Eksemplar
7.	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	24	Kegiatan
8.	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	48	Kegiatan
9.	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah laporan dan data yang terupload pada aplikasi elektronik	4	Dokumen
10.	Terlaksananya Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	2	Unit
11.	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	1	Unit
12.	Terlaksananya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	1	Unit
13.	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Cakupan pemenuhan biaya/jasa pengiriman surat	100	%
14.	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pemenuhan jasa komunikasi, sumber daya listrik, dan air	100	%

15.	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dalam kondisi baik	Jumlah kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	16	Unit
16.	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya dalam kondisi baik	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	30	Unit
17.	Tersedianya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dalam kondisi baik	Jumlah Luas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	1.470	M2
18.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dalam kondisi baik	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	8	Unit

2.c. Matriks Perjanjian Kinerja Kasubag Keuangan

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1.	Tersediaanya Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang memperoleh gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	100	%
2.	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pemenuhan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100	%
3.	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12	Dokumen
4.	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun	5	Dokumen

5.	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD yang disusun	5	Dokumen
----	---	---	---	---------

3. Matriks Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	100	%

3.a. Matriks Perjanjian Kinerja Kasi Pengawasan

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1.	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Frekuensi Patroli Trantibum	3	kali/hari

3.b. Matriks Perjanjian Kinerja Kasi Operasi dan Pengendalian

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1.	Terlaksananya pengendalian Keamanan Lingkungan	Persentase Penindakan Gangguan Trantibum	100	%

2.	Tersedianya tenaga pengendali keamanan lingkungan yang handal dan profesional	Jumlah Personil Satpol PP sebagai tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	150	Orang
----	---	--	-----	-------

4. Matriks Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1.	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	48	%

4.a. Matriks Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Operasional Perlindungan Masyarakat Bidang Perlindungan Masyarakat

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1.	Terlaksananya Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pembinaan Operasional Linmas	1	Dokumen

5. Matriks Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kepatuhan masyarakat dan badan hukum terhadap Peraturan Daerah	Cakupan Penegakan PERDA	100	%
2.	Terwujudnya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri	Jumlah PPNS yang profesional	1	Orang

	Sipil (PPNS)			
--	--------------	--	--	--

5.a. Matriks Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1.	Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Penegakan Perda	3	Kegiatan
2.	Terlaksananya Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota	1	Dokumen

5.b. Matriks Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Kerjasama Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1.	Terlaksananya Penegakan dan Penindakan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Daerah	Persentase pelanggaran terhadap peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota yang ditangani	100	%

6. Matriks Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pemadam Kebakaran

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kesiagaan dan pengendalian bencana kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	43,25	%

**6.a. Matriks Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Pencegahan dan Penyuluhan
Kebakaran Bidang Pemadam Kebakaran**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1.	Terlaksananya Sosialisasi Pencegahan Kebakaran	Jumlah Kegiatan dan Media Sosialisasi Pencegahan Kebakaran	4	Kegiatan

**6.b. Matriks Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Pengendalian Operasional
Kebakaran Bidang Pemadam Kebakaran**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1.	Terlaksananya Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kejadian kebakaran dalam daerah kabupaten/kota yang berhasil dipadamkan dan dikendalikan sesuai standar	100	%
2.	Terlaksananya Pengadaan Sarpras Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan APD	Jumlah Sarana dan Prasarana serta APD yang diadakan	11	Unit
3.	Terlaksananya Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan APD	Jumlah Sarana dan Prasarana serta APD yang diadakan	14	Unit

2.4. PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, target kinerja dan pendanaan indikatif Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2022

Kegiatan	Sub Kegiatan			Ket	
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan Target		
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Input : Dana	Rp.	87.150.000	
		Output : Jumlah Laporan Pembinaan Operasional Linmas	Dokumen	1	
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Input : Dana	Rp.	82.240.000	
		Output : Jumlah Personil Satpol PP sebagai tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan yang mengikuti pelatihan	Orang	150	
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Input : Dana	Rp.	1.069.360.000	
		Output : Persentase Penindakan Gangguan Trantibum	%	100	
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Input : Dana	Rp.	80.730.000		
	Output : Frekuensi Patroli Trantibum	Kali/Hari	3		
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Input : Dana	Rp.	32.000.000	
		Output : Jumlah Kegiatan Sosialisasi Penegakan Perda	Kegiatan	3	
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Input : Dana	Rp.	32.400.000	
		Output : Jumlah laporan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota	Dokumen	1	
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Input : Dana	Rp.	486.100.000		
	Output : Persentase pelanggaran terhadap peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota yang ditangani	%	100		
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Input : Dana	Rp.	228.020.000	
		Output : Jumlah Kegiatan dan Media Sosialisasi Pencegahan Kebakaran	Kegiatan	4	
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Input : Dana	Rp.	19.950.000	
Output : Persentase kejadian kebakaran dalam daerah kabupaten/kota yang berhasil dipadamkan dan dikendalikan sesuai standar		%	100		
Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Input : Dana	Rp.	55.000.000		
	Output : Jumlah Sarana dan Prasarana serta APD yang distandarisasi	Unit	14		

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Input : Dana Output : Jumlah sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang diadakan	Rp. Unit	256.500.000 11	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Input : Dana Output : Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang ditetapkan	Rp. Dokumen	28.319.950 2	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Input : Dana Output : Jumlah dokumen RKA-SKPD yang ditetapkan	Rp. Dokumen	29.319.900 2	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : Dana Output : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Rp. Dokumen	29.939.900 1	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Input : Dana Output : Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Rp. Bulan	2.448.322.114 14	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Input : Dana Output : Cakupan pemenuhan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp. %	93.120.000 100	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Input : Dana Output : Jumlah laporan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Rp. Dokumen	42.579.950 12	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Input : Dana Output : Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun yang disusun	Rp. Dokumen	33.319.750 5	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Input : Dana Output : Jumlah dokumen pelaporan keuangan semesteran yang disusun	Rp. Dokumen	27.869.750 5	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Input : Dana Output : Tersedianya jasa administrasi Barang Milik Daerah	Rp. Bulan	7.200.000 12
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Input : Dana Output : Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	Rp. Stel	240.160.000 165	
	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Input : Dana Output : Jumlah laporan monitoring dan evaluasi kinerja pegawai	Rp. Dokumen	71.510.000 1	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Input : Dana Output : Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Rp. Orang	20.000.000 2	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Input : Dana Output : jumlah logistik kantor yang dibeli	Rp. Paket	26.055.700 12	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input : Dana Output : jumlah barang yang dicetak dan digandakan	Rp. Paket	23.499.700 12	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana Output : Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. Eksemplar	9.000.000 60	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Input : Dana Output : Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	Rp. Kegiatan	9.000.000 24	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Input : Dana Output : Jumlah rapat koordinasi dan	Rp. Kegiatan	346.359.000 48	

	SKPD	konsultasi SKPD yang diselenggarakan			
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Input : Dana	Rp.	75.640.000	
		Output : Jumlah laporan dan data yang terupload pada aplikasi elektronik	Dokumen	4	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Input : Dana	Rp.	22.000.000	
		Output : jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dibeli	Unit	1	
	Pengadaan Mebel	Input : Dana	Rp.	71.080.000	
		Output : jumlah Mebel yang dibeli	Unit	10	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Input : Dana	Rp.	160.974.600	
		Output : jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dibeli	Unit	14	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Input : Dana	Rp.	190.800.000		
	Output : jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibeli	Unit	1		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Dana	Rp.	21.750.000	
		Output : Cakupan pemenuhan biaya/jasa pengiriman surat	Persen	100	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Dana	Rp.	60.560.000	
		Output : Cakupan pemenuhan jasa komunikasi, sumber daya listrik, dan air	Persen	100	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Input : Dana	Rp.	143.500.000	
		Output : Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dalam kondisi baik	Unit	16	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Input : Dana	Rp.	15.700.000	
		Output : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	30	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Input : Dana	Rp.	72.160.000	
		Output : Luas gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	M2	1.470	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Input : Dana	Rp.	4.000.000	
		Output : jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	8	

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah program dalam rangka pencapaian sasaran SKPD Satpol PP adalah sebanyak 3 Program Pokok, sedangkan kegiatan dalam mendukung program-program tersebut berjumlah 11 Kegiatan serta 39 Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretaris dan 4 (empat) bidang penanggung jawab dengan total anggarannya yaitu sebesar Rp. 6.782.052.614,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana yang mana pengukuran capaian kinerja Tahun 2022 didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, ditetapkan dengan indikator kinerja yaitu masukan (*input*) dan keluaran (*output*).

3.1. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah.

Pengukuran capaian kinerja sasaran dilakukan dengan menggunakan metode pembandingan capaian kinerja sasaran. Metode pembandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai organisasi. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Gambaran pencapaian masing-masing sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1. Target dan Realisasi Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1.	Tingkat Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan OPD	80 (Baik)	90,7 (Baik)	100
2.	Hasil Evaluasi SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja oleh Inspektorat Daerah	81 (A)	73,1 (BB)	90,25

Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis secara kuantitatif yang telah diuraikan pada Tabel 3.1. di atas terlihat jelas bahwa 2 (dua) sasaran dengan masing-masing 1 (satu) indikator kinerja, dimana untuk indikator kinerja pertama dari target Baik, terealisasi Baik pula sehingga capaian kinerja yang dicapai 100%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan OPD terealisasi sesuai dengan dari target yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja kedua dari target A terealisasi BB sehingga capaian kinerja yang dicapai 90,25%, sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Hasil Evaluasi SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja oleh Inspektorat Daerah tercapai sebesar 90,25% dari target yang ditetapkan.

Gambaran pencapaian masing-masing sasaran juga dapat dilihat pada Formulir Pengukuran Kinerja sebagai berikut :

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
TAHUN 2022

Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja
 Tahun Anggaran : 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		%
		2022	s.d 2022	2022	s.d 2022	
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya kualitas pelayanan publik OPD	Nilai kepuasan masyarakat berdasarkan hasil survei	80 (Baik)	80 (Baik)	90,3 (Baik)	90,3 (Baik)	100
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	Hasil Evaluasi SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja oleh Inspektorat Daerah	81 (A)	81 (A)	73,1 (BB)	73,1 (BB)	90,25

Untuk melihat konsistensi pencapaian kinerja dapat dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian kinerja 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut. Hal ini digambarkan secara detail pada tabel berikut :

Tabel 3.2. Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022, 2021 dan 2020

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja		
		2022	2021	2020
1	2	3	4	5
1.	Nilai kepuasan masyarakat berdasarkan hasil survei	90,3 (Baik)	88 (Baik)	87 (Baik)
2.	Hasil Evaluasi SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja oleh Inspektorat Daerah	73,1 (BB)	74 (BB)	71 (BB)

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa untuk indikator kinerja pertama mengalami kenaikan capaian kinerja dimana pada tahun 2020, 2021 dan 2022 memiliki konsistensi yang baik karena capaian kinerja dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.

Begitu pula dengan indikator kedua mengalami kestabilan capaian kinerja dimana pada tahun 2020 terealisasi BB dan sama pada tahun 2020 dan 2021, sedangkan target yang telah ditetapkan adalah A. Hal ini disebabkan karena belum

menggunakan aplikasi yang terintegrasi mulai dari perencanaan kinerja sampai capaian kinerja sehingga belum memperoleh nilai maksimal.

Selanjutnya untuk membandingkan target yang diharapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana dengan realisasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana Tahun 2022 dapat dipaparkan pada tabel berikut :

Tabel 3.3. Realisasi Kinerja Tahun 2021 terhadap Target Kinerja RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Realisasi 2022	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1.	Nilai kepuasan masyarakat berdasarkan hasil survei	Baik	Baik	100
2.	Hasil Evaluasi SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja oleh Inspektorat Daerah	A	BB	90,25

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa dari 2 (dua) indikator kinerja dimana untuk indikator kinerja pertama pada RPJMD ditargetkan Baik dan terealisasi Baik pula sehingga tercapai 100 %, sedangkan untuk indikator kinerja kedua pada RPJMD ditargetkan tercapai A dan terealisasi BB sehingga capaian kinerja yang dicapai sejumlah 90,25 %.

Untuk membandingkan standar nasional (target nasional) dengan realisasi kinerja Kabupaten Bombana Tahun 2022 dapat dipaparkan pada tabel berikut :

Tabel 3.4. Realisasi Kinerja Kabupaten Bombana terhadap Target Kinerja RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Bombana	Target Nasional	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1.	Nilai kepuasan masyarakat berdasarkan hasil survei	90,3 (Baik)	Baik	100
2.	Hasil Evaluasi SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja oleh Inspektorat Daerah	73,1 (BB)	BB	100

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa dari 2 (dua) indikator kinerja, dimana untuk indikator kinerja pertama pada Standar Nasional ditargetkan tercapai Baik sedangkan pada tahun 2022 terealisasi Baik sehingga capaian kinerja Kabupaten Bombana yang dicapai sejumlah 100 %, sedangkan untuk indikator kinerja kedua pada target nasional ditargetkan tercapai BB sedangkan pada tahun 2021 terealisasi BB sehingga capaian kinerja Kabupaten Bombana yang dicapai sejumlah 100 %.

Pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana Tahun 2022 tidak terlepas dari dukungan pencapaian kinerja dari manajemen tingkat menengah dan tingkat bawah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada pengukuran kinerja berikut :

1. Sekretaris :

Tabel 3.5. Realisasi Capaian Kinerja Sekretaris Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1.	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun	3 Dok.	3 Dok.	100
2.	Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	100%	100
3.	Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah	100%	100%	100
4.	Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	100%	100
5.	Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	100
6.	Jenis dan jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang dibeli	6 jenis dan 6 unit	6 jenis dan 6 unit	100
7.	Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100

8.	Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	48 unit	48 unit	100
----	---	---------	---------	-----

Dari tabel 3.5 tersebut di atas dapat dilihat bahwa dari 8 (delapan) indikator kinerja yang ditargetkan, semuanya terealisasi Baik pada tahun 2022 sehingga capaian kinerja Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana yang dicapai sejumlah 100 % untuk 8 (delapan) indikator kinerja.

Pencapaian kinerja Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana Tahun 2022 tidak terlepas dari dukungan pencapaian kinerja dari manajemen tingkat bawah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada pengukuran kinerja berikut :

1.a. Kepala Sub Bagian Perencanaan

Tabel 3.6. Realisasi Capaian Kinerja Kepala Sub Bagian Perencanaan Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1.	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang ditetapkan	2 Dok.	2 Dok.	100
2.	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang ditetapkan	2 Dok.	2 Dok.	100
3.	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1 Dok.	1 Dok.	100

Dari tabel 3.6 tersebut di atas dapat dilihat bahwa dari 3 (tiga) indikator kinerja yang ditargetkan, semuanya terealisasi Baik pada tahun 2022 sehingga capaian kinerja Kepala Sub Bagian Perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana yang dicapai sejumlah 100 % untuk 3 (tiga) indikator kinerja.

1.b. Kepala Sub Bagian Keuangan

Tabel 3.7. Realisasi Capaian Kinerja Kepala Sub Bagian Keuangan Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1.	Persentase ASN yang memperoleh gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	100%	100%	100
2.	Cakupan pemenuhan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	100%	100
3.	Jumlah laporan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 Dok.	12 Dok.	100
4.	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun	5 Dok.	5 Dok.	100
5.	Jumlah laporan keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD yang disusun	5 Dok.	5 Dok.	100

Dari tabel 3.7 tersebut di atas dapat dilihat bahwa dari 5 (lima) indikator kinerja yang ditargetkan, semuanya terealisasi Baik pada tahun 2022 sehingga capaian kinerja Kepala Sub Bagian Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana yang dicapai sejumlah 100 % untuk 5 (lima) indikator kinerja.

1.c. Kepala Sub Bagian Umum

Tabel 3.8. Realisasi Capaian Kinerja Kepala Sub Bagian Umum Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1.	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	165 Stel	165 Stel	100
2.	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi kinerja pegawai	1 Dok.	1 Dok.	100
3.	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	2 Orang	2 Orang	100
4.	Jenis dan jumlah logistik kantor yang dibeli	12 Paket	12 Paket	100
5.	Jenis dan jumlah barang yang dicetak dan digandakan disusun	12 Paket	12 Paket	100

6.	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	60 Eksemplar	60 Eksemplar	100
7.	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	24 Kegiatan	24 Kegiatan	100
8.	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Kegiatan	48 Kegiatan	100
9.	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	100
10.	Terlaksananya Pengadaan Mebel	2 Unit	2 Unit	100
11.	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Unit	1 Unit	100
12.	Terlaksananya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	100
13.	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	100%	100%	100
14.	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	100
15.	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dalam kondisi baik	16 Unit	16 Unit	100
16.	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya dalam kondisi baik	30 Unit	30 Unit	100
17.	Tersedianya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dalam kondisi baik	1.470 m2	1.470 m2	100
18.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dalam kondisi baik	8 Unit	8 Unit	100

Dari tabel 3.8 tersebut di atas dapat dilihat bahwa dari 18 indikator kinerja yang ditargetkan, semuanya terealisasi Baik pada tahun 2022 sehingga capaian kinerja Kepala Sub Bagian Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana yang dicapai sejumlah 100 % untuk 18 indikator kinerja.

2. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah :

Tabel 3.9. Realisasi Capaian Kinerja Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1.	Cakupan Penegakan PERDA	100%	97,3%	97,3

Dari tabel 3.9 tersebut di atas dapat dilihat bahwa dari 1 (satu) indikator kinerja yang ditargetkan 100 %, terealisasi Baik senilai 97,3 % pada tahun 2022 sehingga capaian kinerja Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana yang dicapai sejumlah 97,3 % untuk 1 (satu) indikator kinerja.

Pencapaian kinerja Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana Tahun 2022 tidak terlepas dari dukungan pencapaian kinerja dari manajemen tingkat bawah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada pengukuran kinerja berikut :

2.a. Kepala Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan

Tabel 3.10. Realisasi Capaian Kinerja Kepala Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1.	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Penegakan Perda	3 Kegiatan	3 Keg.	100
2.	Jumlah laporan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota	1 Dok.	1 Dok.	100

Dari tabel 3.10 tersebut di atas dapat dilihat bahwa dari 2 (dua) indikator kinerja yang ditargetkan, semuanya terealisasi Baik pada tahun 2022 sehingga capaian kinerja Kepala Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Satuan

Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana yang dicapai sejumlah 100 % untuk 2 (dua) indikator kinerja.

2.b. Kepala Seksi Kerjasama

Tabel 3.11. Realisasi Capaian Kinerja Kepala Seksi Kerjasama Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1.	Persentase pelanggaran perda yang ditangani	100%	97,3%	97,3

Dari tabel 3.11 tersebut di atas dapat dilihat bahwa dari 1 (satu) indikator kinerja yang ditargetkan, terealisasi Baik mencapai 97,3 % pada tahun 2022 sehingga capaian kinerja Kepala Seksi Kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana yang dicapai sejumlah 97,3 % untuk 1 (satu) indikator kinerja.

3. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum :

Tabel 3.12. Realisasi Capaian Kinerja Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Daerah Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	97,44%	97,44

Dari tabel 3.12 tersebut di atas dapat dilihat bahwa dari 1 (satu) indikator kinerja yang ditargetkan 100 %, terealisasi Baik senilai 97,44 % pada tahun 2022 sehingga capaian kinerja Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana yang dicapai sejumlah 97,44 % untuk 1 (satu) indikator kinerja.

Pencapaian kinerja Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana Tahun 2022 tidak terlepas dari dukungan pencapaian kinerja dari manajemen tingkat bawah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada pengukuran kinerja berikut :

3.a. Kepala Seksi Pengawasan

Tabel 3.13. Realisasi Capaian Kinerja Kepala Seksi Pengawasan Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1.	Frekuensi Patroli Trantibum	3 kali/hari	3 kali/hari	100

Dari tabel 3.13 tersebut di atas dapat dilihat bahwa dari 1 (satu) indikator kinerja yang ditargetkan, terealisasi Baik mencapai 100 % pada tahun 2022 sehingga capaian kinerja Kepala Seksi Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana yang dicapai sejumlah 100 % untuk 1 (satu) indikator kinerja.

3.b. Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian

Tabel 3.14. Realisasi Capaian Kinerja Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1.	Persentase Penindakan Gangguan Trantibum	100%	100%	100
2.	Jumlah Personil Satpol PP sebagai tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	150 Orang	150 Orang	100

Dari tabel 3.14 tersebut di atas dapat dilihat bahwa dari 2 (dua) indikator kinerja yang ditargetkan, semuanya terealisasi Baik mencapai 100 % pada tahun 2022 sehingga capaian kinerja Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Satuan

Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana yang dicapai sejumlah 100 % untuk 2 (dua) indikator kinerja.

4. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran :

Tabel 3.15. Realisasi Capaian Kinerja Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Daerah Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	43,25%	43,25%	100

Dari tabel 3.15 tersebut di atas dapat dilihat bahwa dari 1 (satu) indikator kinerja yang ditargetkan 100 %, terealisasi Baik senilai 100 % pada tahun 2022 sehingga capaian kinerja Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana yang dicapai sejumlah 100 % untuk 1 (satu) indikator kinerja.

Pencapaian kinerja Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana Tahun 2022 tidak terlepas dari dukungan pencapaian kinerja dari manajemen tingkat bawah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada pengukuran kinerja berikut :

4.a. Kepala Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran

Tabel 3.16. Realisasi Capaian Kinerja Kepala Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1.	Jumlah Kegiatan dan Media Sosialisasi Pencegahan Kebakaran	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100

Dari tabel 3.16 tersebut di atas dapat dilihat bahwa dari 1 (satu) indikator kinerja yang ditargetkan, terealisasi Baik mencapai 100 % pada tahun 2022 sehingga capaian kinerja Kepala Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana yang dicapai sejumlah 100 % untuk 1 (satu) indikator kinerja.

4.b. Kepala Seksi Pengendalian Operasional Kebakaran

Tabel 3.17. Realisasi Capaian Kinerja Kepala Seksi Pengendalian Operasional Kebakaran Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1.	Persentase kejadian kebakaran dalam daerah kabupaten/kota yang berhasil dipadamkan dan dikendalikan sesuai standar	100%	100%	100
2.	Jumlah Sarana dan Prasarana serta APD yang diadakan	10 unit	6 unit	60
3.	Jumlah Sarana dan Prasarana serta APD yang distandarisasi	14 unit	14 unit	100

Dari tabel 3.17 tersebut di atas dapat dilihat bahwa dari 3 (tiga) indikator kinerja yang ditargetkan, dimana indikator kinerja pertama dan ketiga terealisasi Baik mencapai 100 % pada tahun 2022 capaian kinerja Kepala Seksi Pengendalian Operasional Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana yang dicapai sejumlah 100 % untuk 2 (dua) indikator kinerja sedangkan untuk indikator kedua hanya terealisasi sebesar 60 % yang diakibatkan oleh adanya sarana prasarana berupa alat pelindung diri yang mengalami perubahan harga yang terlalu mencolok sehingga gagal untuk diadakan, sehingga capaian kinerja Kepala Seksi Pengendalian Operasional Kebakaran Satuan Polisi Pamong

Praja Kabupaten Bombana yang dicapai sejumlah 60 % untuk indikator kinerja kedua.

Pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana Tahun 2022 tidak terlepas dari dukungan 3 (tiga) program dan kegiatan yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.18. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

No	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Ket
1	Nilai kepuasan masyarakat berdasarkan hasil survei	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.470.480.000	
			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	550.500.000	
		Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	564.470.000	
Jumlah				2,585,450,000	
2	Hasil Evaluasi SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja oleh Inspektorat Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	87.579.750	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.810.773.158	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7,200,000	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	240.160.000	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	495.123.400	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	404.226.900	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82.160.000	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	235.360.000	

		Pemerintahan Daerah		
Jumlah			4.362.583.208	
Total Anggaran			6,948,033,208	

Dari Tabel 3.18. di atas tergambar bahwa indikator kinerja pertama didukung oleh 2 (dua) program dan 3 (tiga) kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2,585,450,000,-.

Untuk indikator kinerja kedua didukung oleh 1 (satu) program dan 8 (delapan) kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 4.362.583.208,-.

3.2. REALISASI ANGGARAN

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana Tahun 2022 mengadakan pengukuran capaian kinerja pada kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pembangunan Daerah.

Selain dilihat dari pengukuran kinerja sasaran, akuntabilitas kinerja juga dapat dilihat dari akuntabilitas keuangannya, yang merupakan bagian dari LAKIP Satpol PP Kabupaten Bombana T.A. 2022 diuraikan sebagai berikut :

A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.

Pada tahun anggaran 2022, Satpol PP Kabupaten Bombana dialokasikan anggaran sebesar Rp. 6,948,033,208,-

B. Analisis Selisih anggaran Satpol PP T.A. 2022

Pada Tahun Anggaran 2022, Satpol PP Kabupaten Bombana melaksanakan 3 (tiga) Program dan 11 (sebelas) kegiatan. Analisa Selisih Dalam pencapaian kinerja keuangan terjadi selisih lebih terhadap pelaksanaan belanja dimana antara anggaran yang tersedia lebih besar dari pada belanja yang dibutuhkan.

Selisih Kelebihan tersebut dapat dilihat pada analisa selisih tersebut :

- Anggaran Belanja	Rp 6,948,033,208,-
- Realisasi Belanja	<u>Rp 6,641,928,141,-</u>
Selisih Anggaran	Rp 306,105,067,-

Dari Analisa selisih belanja tersebut di atas diperoleh selisih lebih anggaran (efisiensi) sebesar Rp. 306,105,067,-

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana adalah hasil kerja keras dan komitmen seluruh aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana serta pihak terkait lainnya dalam rangka mewujudkan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai organisasi yang berakuntabilitas sesuai dengan Tap MPR Nomor XI / MPR / 1998 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. LAKIP ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Demikianlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana ini dibuat semoga memberi hasil yang berarti untuk optimalisasi pencapaian kinerja, sasaran dan kegiatan di tahun yang akan datang. Serta dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi/dalam proses penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Bombana Tahun 2022.